

# **ANALISIS PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI KABUPATEN KENDAL**

Oleh :

Yulinar Ayu Setiani, Dra. Maesaroh, M.Si

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

---

## **ABSTRAK**

*E-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, keberadaan *e-government* diperlukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar tercipta kepemerintaham yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal merupakan program pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik. Rendahnya hasil kualitas *e-government* di Kabupaten Kendal menjadi salah satu pokok permasalahan yang akan dipecahkan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan penekanan pada desain kualitatif-verifikatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan *e-government* dan faktor-faktor penghambat *e-government* di Kabupaten Kendal. Untuk mengetahui sejauh mana pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal dalam penelitian ini menggunakan hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* yaitu elemen sukses yang meliputi *support*, *capacity*, dan *value*. Hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal sudah berjalan dengan baik. Pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal juga masih dihambat oleh beberapa faktor seperti sumberdaya manusia dan infrastruktur sehingga pemerintah Kabupaten Kendal perlu meningkatkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana infrastruktur untuk menunjang keberhasilan pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal.

**Kata Kunci : *E-governmet*, Analisis Pengembangan, Faktor Penghambat**

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia dan memberikan kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi. Salah satu penerapan teknologi informasi di dunia pemerintah adalah *e-government*. *E-government* dapat diterapkan untuk mengatasi perubahan paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada kepastian berusaha.

Pelaksanaan *e-government* di Indonesia sudah mulai diperkenalkan pada tahun 2001 melalui INPRES Nomor 6 tentang Telekomunikasi, Media dan Informatika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informasi untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Selanjutnya pada tahun 2003 dalam kaitannya dengan *e-government* Presiden mengeluarkan INPRES Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Presiden mengintruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Dan Tinggi Negara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung

Republik Indonesia, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

Pemerintah Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kabupaten yang telah menerapkan *e-government*. Terkait dengan INPRES Nomor 3 Tahun 2003, Pemerintahan Kabupaten Kendal sebagaimana situs pemerintahan pada umumnya yang memberikan layanan informasi, materi informasi yang sifatnya internal, seperti : berita seputar Kabupaten Kendal, gambaran umum daerah, artikel dan beberapa dokumen yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan berbagai peraturan yang ada di Kabupaten Kendal. Penerapan *e-government* diharapkan mempermudah penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dengan cepat, tepat, mudah dan sederhana. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu didukung semangat keterbukaan yang salah satunya dapat dicapai melalui pelaksanaan *e-government*.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan tentang apa yang ingin dicapai oleh peneliti atas hasil penelitian

dengan menyimpulkan pada usaha yang mengarah pada sejumlah pengetahuan yang ingin dipahami dan diteliti.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Good Governance***

Pemerintah akan berjalan baik apabila diikuti dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip *good governance* harus diterapkan untuk menghindari praktik KKN. Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, dan saling terbuka.

Paradigma NPS birokrasi harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada masyarakat sebagai warga negara, mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada, dan menghargai masyarakat.

### **Pengembangan *E-Government***

Pengembangan *e-government* harus dilaksanakan secara harmonis dengan mengoptimalkan hubungan antara inisiatif masing-masing instansi dan penguatan kerangka kebijakan untuk menjamin keterpaduannya dalam suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja. Pengembangan *e-government* yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun rencana strategis pengembangan *e-government* di lingkungannya masing-masing. Rencana Strategis itu dengan jelas menjabarkan lingkup dan sasaran pengembangan *e-government* yang ingin dicapai; kondisi yang dimiliki pada saat ini; strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan; kebutuhan dan rencana pengembangan sumber daya manusia; serta rencana investasi yang diperlukan. Untuk menghindari pemborosan anggaran pemerintah, penyusunan rencana investasi harus disertai dengan analisis kelayakan investasi.

### ***E-Government***

Implementasi *e-government* yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara selain

tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan atau mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.

### **Elemen Sukses Pengembangan E-Government**

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* (Indrajit, 2006 : 13), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, terdapat tida elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah sebagai *support, capacity, value*.

- 1) *Support*, yang mendukung dalam pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal, seperti :
  - a. *Political Will*, untuk mengetahui sejauhmana kemauan pemerintah Kabupaten Kendal untuk melakukan pengembangan *e-government*.
  - b. Sosialisasi, mengetahui bagaimana pemerintah mensosialisasikan upaya yang digunakan untuk mengembangkan *e-government*.
- 2) *Capacity*, merupakan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upaya pengembangan *e-government* yang dilihat melalui :

- a. Sumber daya finansial, untuk mengetahui anggaran yang ditetapkan untuk alokasi dana pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal.
  - b. Sumber daya manusia, menganalisa sejauh mana kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada dalam mengelola dan mengakses teknologi informasi.
  - c. Infrastruktur teknologi informasi, untuk mengetahui bagaimana jaringan telekomunikasi dan akses yang telah disiapkan.
- 3) *Value*, merupakan manfaat apa yang dapat diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kendal kepada masyarakat dengan adanya pengembangan *e-government*.
- a. Bagi Pemerintah  
Mengetahui apa manfaat yang diperoleh pemerintah dengan adanya *e-government*
  - b. Bagi Masyarakat  
Mengetahui tanggapan dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya *e-government*.

### **Faktor-Faktor Penghambat E-Government**

Dalam mengimplementasikan *e-government* tentunya akan ada hambatan-hambatan yang muncul. faktor penghambat pengembangan *e-government* anantara lain :

1. Sumber Daya Manusia
2. Infrastruktur

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-verifikatif. Format desain kualitatif-verifikatif merupakan sebuah upaya pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian yang akan dilakukan. Format ini lebih banyak mengkonstruksi format penelitian dan strategi memperoleh data di lapangan, sehingga format penelitiannya menganut model induktif.

Fokus penelitian ini adalah pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal dan faktor penghambat pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal. Sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi

## **PEMBAHASAN**

### **2.1 Elemen Sukses Pengembangan *Electronic Government* di Kabupaten Kendal**

#### **a. Elemen *Support* dalam Pengembangan *E-Government***

Berdasarkan hasil lapangan menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan *e-government* sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Adanya konsep ini pemerintah harus memiliki komitmen untuk mendorong setiap instansi pemerintah memanfaatkan teknologi informasi. Permasalahannya terletak pada belum ada regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Kendal. Namun, Bupati Kendal selaku pemegang kekuasaan tertinggi mendukung *e-government* melalui visi misi yang telah ditetapkan.

Sosialisasi *e-government* yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dilakukan dengan cara dimuatkan ke dalam program-program yang dijalankan saja. Hal ini berakibat pada kurangnya orang yang mengetahui website yang telah disediakan.

#### **b. Elemen *Capacity* dalam Pengembangan *E-Government***

Elemen *Capacity* berkaitan dengan tersedianya sumberdaya. Sumberdaya yang harus dipenuhi adalah sumber daya finansial, sumberdaya manusia, dan

infrastuktur. Berkaitan dengan sumberdaya finansial, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal memiliki sedikit kendala dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan *e-government*. Hal tersebut dikarenakan alokasi anggaran *e-governemnt* masih menjadi satu dengan pos anggaran lainnya.

Dilihat dari sumberdaya manusia, terdapat permasalahan eksternal yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dalam melakukan pengembangan *e-government*. Kurangnya sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola masing-masing portal website instansi pemerintah sehingga semua pelaksanaan masih terpusat di Diskominfo Kabupaten Kendal.

Sementara itu, dilihat dari segi infrastruktur teknologi sebagai alat penunjang pelaksanaan pengembangan *e-government* sudah mencukupi. Hanya saja masih dibutuhkan alat seperti genset yang dapat digunakan sebagai pengganti tenaga listrik ketika terjadi mati listrik. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya *server down* karena koneksi jaringan terputus.

### **c. Elemen Value dalam Pengembangan E-Government**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa website Pemerintah Kabupaten Kendal yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kendal memiliki manfaat yang sangat besar bagi pemerintah. Manfaat tersebut adalah pemerintah dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi publik, mengurangi biaya administrasi dan pemerintah bekerja lebih efektif dan efisien.

Berbeda dengan manfaat yang dirasakan oleh pemerintah, masyarakat selaku sasaran atau penerima layanan secara elektronik ini justru belum merasakan secara nyata manfaat *e-government* di Kabupaten Kendal. Hal tersebut dikarenakan informasi yang dimuat kurang *update*, informasi yang ditampilkan kurang informatif, dan website instansi pemerintah belum semua terintegrasi dengan website resmi Pemerintah Kabupaten Kendal.

## **2.2 Faktor Penghambat Pengembangan Electronic Government di Kabupaten Kendal**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Hasil penelitian pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa sumberdaya manusia masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Kendal dalam melakukan pengembangan *e-government*. Belum adanya inisiasi pemerintah untuk memberikan pelatihan secara khusus kepada sumberdaya manusia yang ada di lingkungan OPD pemerintah Kabupaten

Kendal menyebabkan pengelolaan website di masing-masing OPD tidak berfungsi.

#### **b. Infrastruktur**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan yang sulit untuk ditangani, seperti belum dimilikinya aplikasi *intelligent* manajemen dan *genset* yang dapat digunakan sebagai pengganti daya listrik ketika listrik padam. Aplikasi *intelligent* manajemen merupakan sebuah aplikasi yang dapat menarik berita dari media sosial, situs lapor, berita *online*, atau pun sistem aduan yang disediakan pada situs website. Sementara *genset*, merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pengganti tenaga listrik ketika terjadi masti listrik sehingga dapat menghindari kemungkinan *server down*.

## **PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat diidentifikasi melalui elemen sukses pengembangan *e-government* yang meliputi *support*, *capacity*, *value* dan faktor-faktor penghambat pengembangan *e-government*.

*Support* merupakan merupakan seberapa jauh dukungan pemerintah dalam melakukan pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* di

Kabupaten Kendal sudah didukung dengan visi misi yang telah ditetapkan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan paling tinggi dalam memberikan kesepakan pelaksanaan pengembangan *e-government*.

Kapasitas sumberdaya sangat diperlukan dalam meningkatkan pengembangan *e-govevernment*. Kapasitas sumber daya finansial sebagai tolok ukur keseriusan pemerintah Kabupaten Kendal dalam mengalokasikan anggaran untuk pengembangan *e-government* dirasa masih minim. Selanjutnya, kapasitas infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kendal sudah cukup memadai, dimana di masing-masing lembaga pemerintah telah memiliki perangkat keras komputer dan jaringan internet yang disediakan oleh pemerintah.

Pengembangan *e-government* tidak ada gunanya jika tidak memberikan manfaat bagi penyedia layanan dan penerima layanan. Pemerintah Kabupaten Kendal selaku penyedia layanan mendapatkan manfaat yang cukup banyak diantaranya pemerintah dapat berinteraksi dengan instansi pemerintahan lain, pemerintah dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi publik, mengurangi biaya administrasi dan pemerintah bekerja lebih efektif dan efisien. Selain itu, masyarakat sebagai penerima layanan *e-government* belum merasakan secara nyata

manfaat dari adanya pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal. Hal ini dikarenakan *e-government* masih terlihat kurang informatif sehingga tidak memudahkan pengguna untuk mencari informasi yang diinginkan. Padahal tujuan daripada pengembangan website resmi pemerintah Kabupaten Kendal adalah untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Faktor penghambat pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Kendal adalah belum dimilikinya regulasi yang mengatur tentang *e-government* sebagai payung hukum yang kuat dalam penerapan *e-government*, anggaran yang masih minim dan belum meratanya kapasitas sumberdaya manusia di instansi pemerintah yang mahir mengoperasikan IT.

### 3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan agar pelaksanaan pengembangan *e-government* dapat berjalan semakin optimal adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Kendal harus segera membuat regulasi berupa Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah untuk mendukung pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Kendal.
2. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia khususnya aparat pemerintah

masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah secara terus menerus.

3. Perlu adanya peningkatan jumlah sarana dan prasarana infrastruktur seperti *web server* masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan *genset* sebagai pengganti tenaga listrik ketika terjadi mati listrik.
4. Perlu adanya sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat tentang keberadaan penerapan *e-government* dan pemanfaatannya
5. Untuk mensiasati hambatan-hambatan yang muncul, pemerintah perlu bekerjasama dengan berbagai *stakeholder* dalam melaksanakan pengembangan *e-government*.

### Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara : Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government*. Yogyakarta : Andi
- \_\_\_\_\_. 2007. *Electronic Government in Action : Strategi Implementasi di*

*Berbagai Negara*. Jakarta : Aptikom

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telekomunikasi, Media, dan Informatika

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2018

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal

#### **Internet :**

<http://pegi.layanan.go.id/>

[www.kendalkab.go.id](http://www.kendalkab.go.id)

Pusdatinkomtel Kemendagri. 2016.

Alamat Website Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia :

<http://www.kemendagri.go.id/me dia/filemanager>

[/2015/05/21/w/e/website](http://2015/05/21/w/e/website)

[pemda\\_2.pdf](#) (diakses 20 September 2016)